



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN



RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024



Jl. Tripandita 03, MAGETAN



0351 894209



dpmdmagetan



dpmdmagetan

i KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan amanat dari pasal 106 dan 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Semoga Rencana Kerja tahun 2024 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengukuran capaian target kinerja yang akurat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Magetan.

Magetan, Juli 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001

ii **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat	25
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan	28
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
Bab V PENUTUP	37

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka perlu dirumuskan secara :

- 1) *Transparan* , yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 2) *Responsif*, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- 3) *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- 4) *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- 5) *Akuntabel*, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 6) *Partisipatif*, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- 7) *Terukur*, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- 8) *Berkeadilan*, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- 9) *Berwawasan lingkungan*, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- 10) *Berkelanjutan*, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Kepala Perangkat daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2023. Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya akan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bappeda Litbang untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi sebagaimana dimaksud untuk memastikan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, Target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4.Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 9.999.909.390,- yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan terealisasi sebesar Rp 9.366.087.291,- atau sebesar **93,66 %**.

Pada tahun 2022 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola pelaksanaan 5 program dan 9 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2022. Capaian penyerapan sudah sesuai target dengan melakukan efisiensi anggaran. Meskipun beberapa kegiatan yang dilaksanakan menunggu perubahan anggaran dikarenakan jumlah anggaran yang tertuang diawal renja tidak mencukupi karena adanya perubahan rencana dan target kegiatan.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2018-2023)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target 2022	Realisasi renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2023	Tinglat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik %	40	39,8						0%
	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa ;jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa ; Desa	184,00 ; 180,00	0:0						#VALUE!
	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD;jumlah BPD yang dibina Desa ; Desa	207,00 ; 207,00	207						#VALUE!
	Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan Orang	2295	2252						0%
	Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa Desa	207	207						0%
	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik %	28.98	28,9						0%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa Kegiatan	5	5						0%

Rencana Kerja Tahun 2024

	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif %	31.14	30,36					0%
	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK Kegiatan	6	6					0%
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjantal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu Orang	235	235					0%
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan Lembaga	36	34					0%
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif %	89.52	83,4					0%
	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibentuk;Jumlah Bumdes yang dikembangkan Bumdes ; Bumdes	58,00 ; 179,00	26:178					#VALUE!
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan kelompok	179	179					0%
	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan kali	2	2					0%
	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPB Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPB Kegiatan	3	3					0%
	Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan Kegiatan	3	3					0%
	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan pasar desa	34	34					0%
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev kelompok	179						0%
	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna %	84.21	84,2					0%
	Fasilitasi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG kelompok	64	64					0%

Rencana Kerja Tahun 2024

	Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif Desa	0							#DIV/0!
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat %	100	100						0%
	Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga Kegiatan	2							0%
	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembanguna daerah dengan desa Desa	2	2						0%
	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan Kegiatan	3	3						0%
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong kali	2	2						0%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa Kegiatan	2	2						0%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik II %	180	50	60	60	100%	70	180	100%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik II Desa	371	103	124	124	100%	144	371	100%
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintah Desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	621	207	207	207	100%	207	621	100%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	15	5	5	5	100%	5	15	100%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa	12	4	4	4	100%	4	12	100%

Rencana Kerja Tahun 2024

2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	621	207	207	207	100%	207	621	100%
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	18	6	6	6	100%	6	18	100%
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	7	2	2	2	100%	2	6	86%
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	9	3	3	3	100%	3	9	100%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa		0	0	0	#DIV/0!	4	4	#DIV/0!
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	621	207	207	207	100%	207	621	100%
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa II %	300	100	100	100	100%	100	300	100%
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa II desa	18	6	6	6	100%	6	18	100%
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa	9	3	3		100%	3	9	100%

Rencana Kerja Tahun 2024

						3				
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi desa dengan pihak ketiga	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif II %	120	30	40	40	100%	50	120	100%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif II Lembaga	1489	372	496	496	100%	621	1489	100%
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	705	235	235	235	100%	235	705	100%
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	108	36	36	36	100%	36	108	100%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa	24	8	8	8	100%	8	24	100%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan	204	68	68	68	100%	68	204	100%

Rencana Kerja Tahun 2024

2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	6	2	2	2	100%	2	6	100%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	36	12	12	12	100%	12	36	100%
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	300	100	100	100	100%	100	300	100%
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	21	7	7	7	100%	7	21	100%
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa	6	2	2	2	100%	2	6	100%
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa	6	2	2	2	100%	2	6	100%
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa	9	3	3	3	100%	3	9	100%
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat II Skor		79	79	79	100%	79	237	#DIV/0!
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15	5	5	5	100%	5	15	100%
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12	4	4	4	100%	3	11	92%
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yng disusun	3	1	1	1	100%	12	14	467%

Rencana Kerja Tahun 2024

2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	132	44	44	44	100%	44	132	100%
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	78	26	26	26	100%	26	78	100%
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	54	18	18	18	100%	18	54	100%
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	36	12	0	0	#DIV/0!	12	24	67%
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pemeliharaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	36	12	0	0	#DIV/0!	1	13	36%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	36	12	12	12	100%	12	36	100%
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	36	12	12	12	100%	1	25	69%
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	36	12	12	12	100%	1	25	69%
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	36	12	12	12	100%	1	25	69%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	36	12	12	12	100%	1	25	69%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	36	12	12	12	100%	1	25	69%
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	36	12	12	9	75%	12	33	92%

Rencana Kerja Tahun 2024

2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	100%	2	26	72%
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	36	12	12	12	100%	12	36	100%
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36	12	12	12	100%	2	26	72%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	36	12	12	12	100%	2	26	72%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	36	12	12	12	100%	2	26	72%
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	57	19	19	19	100%	19	57	100%
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	51	17	17	17	100%	17	51	100%
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	3	1	1	1	100%	1	3	100%
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	1	1	1	100%	1	3	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar

mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (bottom up approach), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat, berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach), pendekatan lintas sektoral dan program (cross sectoral program approach), pendayagunaan teknologi tepat guna (appropriate technology approach) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Magetan saat ini masih relative tinggi, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap SKPD, Urusan Pilihan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

A. Urusan Wajib setiap SKPD

Pada Urusan Wajib SKPD terdapat 1 Program yang meliputi 5 kegiatan sebagai penunjang kegiatan dinas/operasional kedinasan untuk kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Pilihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Program Penataan Desa;
kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel berikut :

Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN**

NO.	INDIKATOR	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
A	Urusan Pemberdayaan Pemerintahan Desa									
1.	Persentase Lembaga dan Pemerintahan Desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	30	40	45	55	60	45	60	70	
2.	Persentase Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif	24,15	31,14	38,65	45,89	50,72	38,65	40	50	
B.	Urusan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan									
1.	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	86,38	89,52	92,67	95,81	100	92,67	100	100	
2.	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	78,95	84,21	89,47	97,37	100	89,47	100	100	
NO.	INDIKATOR	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2023	2023	2021	2022	2023	
C.	Urusan Pemberdayaan Pembangunan Desa									
1.	Persentase kegiatan/pembangunan Desa yang melibatkan partisipasi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	19,32	28,98	38,64	43,47	50,72	38,64	41,06	51,6	
C.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	77	79	81	82	79	80	81	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Isu strategis berdasarkan identifikasi permasalahan yang terkait layanan Dinas PMD kabupaten magetan terkait dengan tugas dan fungsinya adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Desa Kab.Magetan untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Jumlah desa yang besar (207desa) yang menjadi prioritas layanan program dengan tidak diimbangi kapasitas organisasi dan SDM membuat target dan capaian sering tidak sesuai rencana.

Melalui identifikasi permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Magetan menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan dan lembaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.
3. Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat desa khususnya peran perempuan dan pemuda.
5. Peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa khususnya BUMDES, Pasar Desa, dan kelompok-kelompok pengelola keuangan
6. Pengembangan teknologi tepat guna.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Program dan Kegiatan SKPD

No	RANCANGAN AWAL SKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 %	3.435.543.363
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	65.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	35.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	30.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	44 laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	44 laporan	2.656.503.363
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 laporan	2.652.503.363	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 laporan	2.652.503.363
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	18 laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	18 laporan	4.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	258.740.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Bulan	20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	70.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	24.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	4.740.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	95.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	95.000.000
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	12 Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	200.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	38.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	23.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	25.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	84.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	137.300.000
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	19 unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	19 unit	255.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	17 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	17 Unit	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 Unit	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	145.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	145.000.000
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	100 %		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	100 %	175.000.000
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	7 Kegiatan		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	7 kegiatan	175.000.000
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa	2 Kegiatan	25.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah kegiatan penetapan status desa	2 Kegiatan	25.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa	2 Kegiatan	35.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi tata wilayah desa	2 Kegiatan	50.000.000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa	3 Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasaran Desa	3 Kegiatan	100.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa	100 %		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa	100 %	90.000.000
3.1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa	6 kegiatan		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama Desa	6 kegiatan	90.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan desa kawasan	3 Kegiatan	40.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan desa kawasan	3 Kegiatan	40.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan potensi desa	3 Kegiatan	50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan potensi desa	3 Kegiatan	50.000.000
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	70%		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	70%	5.803.000.000
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	144 desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	144 desa	5.803.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintah Desa	3 Kegiatan	55,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi peningkatan Administrasi Pemerintah Desa	3 Kegiatan	55.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	207 Desa	29,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	207 Desa	299.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa	3 Kegiatan	75,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa	3 Kegiatan	75.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	5 Kegiatan	250,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	5 Kegiatan	250.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan	2314 Orang	80,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan	2314 Orang	2.372.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	207 Desa	85,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	207 Desa	85.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	6 Kegiatan	125,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Kegiatan Pengembangan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	6 Kegiatan	125.000.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	207 Desa	75,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	207 Desa	2.220.000.000
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	3 Kegiatan	37,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	3 Kegiatan	37.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	3 Kegiatan	30,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	3 Kegiatan	30.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Kegiatan	30,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Kegiatan	30.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan	3 Kegiatan	55,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan	3 Kegiatan	55.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

		BPD				BPD		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa		80.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	12 Desa	80.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	207 Desa	90.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	207 Desa	90.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	50 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	50 %	1.270.000.000
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif	621 lembaga		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif	621 lembaga	1.270.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	235 Orang	50.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta rakor kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	235 Orang	50.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	36 Lembaga	65.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	36 Lembaga	65.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa	8 Kegiatan	155.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan desa	8 Kegiatan	155.000.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan	68 Kelompok	75,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang mendapat pembinaan	68 Kelompok	75.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	2 Kali	125,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	2 Kali	125.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	12 Kegiatan	800,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	12 Kegiatan	800.000.000
JUMLAH			5.913.503.363				10.773.543.363

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan dan forum OPD terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk direalisasikan pada rencana kerja TA 2024. Usulan yang disampaikan sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2024
Kabupaten Magetan

NO	DESA	ALAMAT	KEGIATAN	PAGU USULAN	PAGU REKOMENDASI
1	TANJUNG	BENDO	PENGERASAN JALAN DESA PENGHUBUNG DESA TANJUNG DAN BULAK	300,000,000	300.000.000
2	BELOTAN	BENDO	SARPRAS LAPANGAN DERMO	350,000,000	350.000.000
3	BULUGLEDEG	BENDO	PEMBANGUNAN JEMBATAN	400,000,000	400.000.000
4	PELEM	KARANGREJO	PEMELIHARAAN ASPAL JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA DENGAN KUALITAS HOTMIX	250,000,000	250.000.000
5	KARAS	KARAS	PAVING SELASAR PK5	300,000,000	300.000.000
6	SUMURSONGO	KARAS	PEMBANGUNAN BALAI RAKYAT	450,000,000	450.000.000
7	GEPLAK	KARAS	PENINGKATAN SARPRAS WISATA DUNG BUT (TALUD KOLAM LANJUTAN)	200,000,000	200.000.000
8	JAMBANGAN	KAWEDANAN	MAKADAM JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA (JAMBANGAN - SELOREJO)	107,000,000	107.000.000
9	SUGIHREJO	KAWEDANAN	PEMBUATAN KIOS PASAR DESA	500,000,000	500.000.000
10	KEDIREN	LEMBEYAN	PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN PENGHUBUNG DESA KEDIREN DENGAN DESA LEMBEYAN KULON	200,000,000	200.000.000
11	PUPUS	LEMBEYAN	PENGEMBANGAN PASAR DESA PARON	750,000,000	750.000.000
12	TAMBAKREJO	MAGETAN	SARANA DAN PRASARANA JALAN DESA (RABAT BETON DAN LABUR ASPAL)	200,000,000	200.000.000

Rencana Kerja Tahun 2024

13	RINGINAGUN G	MAGETAN	PEMBANGUNANTAL UD DAN DRAINASE JALAN	200,000,000	200.000.000
14	BARON	MAGETAN	PEMBENGUNA JALAN DESA PENUNJANG PERTANIAN BLOK SERINGIN DESA BARON	400,000,000	400.000.000
15	SEMPOL	MAOSPATI	PEMBANGUAN PAVING JALAN SAWAH	180,000,000	180.000.000
16	DRIYOREJO	NGUNTORONA DI	PEMBANGUNAN BEDAK PASAR HEWAN	250,000,000	250,000,000
17	MBEDAGUN G	PANEKAN	BANTUAN PAVINGISASI DAN PENGEMBANGAN AREA WISATA SUMBER MOLANG	170,000,000	170.000.000
18	KRAJAN	PARANG	PEMBENGUNAN SARPRAS JALAN DESA (TALUD JALAN)	200,000,000	200.000.000
19	PRAGAK	PARANG	BANTUAN RABATBETON JALAN	195,000,000	195.000.000
20	TAMANARUM	PARANG	BANTUAN TALUD JALAN	200,000,000	200.000.000
21	PLANGKRON GAN	PONCOL	PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM	252,644,000	252.644.000
22	CAMPURSARI	SIDOREJO	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TALUD PASAR DESA CAMPURSARI	400,000,000	400,000,000
23	SIDOKERTO	SIDOREJO	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DAN PAVINGISASI HALAMAN RUKO BUMDES	150,000,000	150,000,000
24	BANDAR	SUKOMORO	PEMBANGUNAN BEDAK / KIOS PEDAGANG UMKM	200,000,000	200,000,000
25	BULU	SUKOMORO	PEMBANGUNAN SELASAR PAVING UMKM DAN PENATAAN PUJASERA	200,000,000	200,000,000
26	KENTANGAN	SUKOMORO	PENGASPALAN JALAN MENUJU PONPES BAITUL QURAN KENTANGAN	200,000,000	200,000,000
27	KERANG	TAKERAN	BANTUAN PEMBUATAN RUKO PASAR DESA KERANG	500,000,000	500,000,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Kabupaten Magetan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
- 3) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Magetan merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Magetan memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Magetan dan Provinsi Jawa Timur melalui:

- 1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- 2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 3) Perluasan Lapangan Kerja;
- 4) Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
- 6) Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
- 7) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 8) Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
- 9) Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
- 10) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
- 11) Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
- 12) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- 13) Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
- 14) Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
- 15) Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
- 16) Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
- 17) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (darimasyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan

pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
- 2) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
- 3) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
- 4) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
- 5) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
- 6) Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Magetan;
- 7) Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
- 8) Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal;
- 9) Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
- 10) Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
- 11) Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- 12) Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
- 13) Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari disusunnya rancana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kemandirian desa	1	Persentase Desa Berkategori Desa Mandiri	28,9
1.1	Memberdayakan Kelembagaan Masyarakat Desa	1.1	% Lembaga Masyarakat Desa yang aktif	60
1.2	Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Desa	1.2	% Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang	50
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.3	% Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	70

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Magetan maka pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Desa, kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dan evaluasi dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 antara lain:

1. Isu Global yang mencakup:
 - a. Sustainable Development Goals (SDG's) atau pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda pembangunan dunia yang dibentuk dalam rangka mengatasi isu dalam tiga dimensi yaitu ekonomi (kemiskinan), sosial (kesenjangan) dan lingkungan (perubahan iklim). SDG's merupakan kelanjutan dari pembangunan millennium / Millenium Developmens Goals (MDG's) yang berlaku diseluruh dunia.
 - b. Global warming (Pemanasan Global). Dimana disebutkan bahwa terdapat kenaikan suhu dunia yang berakibat pada pemanasan global yang membahayakan manusia. Oleh karena itu pemerintah maupun swasta perlu melakukan berbagai upaya guna merespon era perubahan iklim yang secara khusus dalam jangka panjang berpotensi merugikan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat secara lokal maupun internasional.
 - c. Revolusi Industry 4.0, revolusi menuju terwujudnya pemerintahan daerah 4.0 yaitu pemerintahan daerah yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.
 - d. Pandemi Covid-19, dimana pandemi yang dialami oleh hampir seluruh negara didunia belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
2. Isu Nasional antara lain:
 - Kualitas SDM Indonesia;
 - Struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing;
 - Pembangunan merata dan berkeadilan;
 - Lingkungan hidup berkelanjutan;
 - Budaya yang berkepribadian bangsa;
 - Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 - Perlindungan dan jaminan keamanan bagi segenap bangsa;
 - Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
 - Sinergitas pemerintah daerah dalam NKRI.
3. Isu provinsi:
 - Kualitas sumber daya manusia;
 - Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
 - Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4. Isu kabupaten dalam hal ini dikaitkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magetan khususnya bidang pembangunan desa yaitu:
- Peningkatan sarana dan prasarana desa;
 - Pengembangan BUMDEs dan lembaga keuangan mikro;
 - Pengembangan pasar desa dan BUMdesa;
 - Pembangunan kawasan ekonomi perdesaan;
 - Pengembangan pengelolaan keuangan desa berbasis IT;
 - Peningkatan kualitas dan kreatifitas aparatur pemerintah desa.

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini akan diuraikan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 5 program, 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan beserta target capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 8.319.719.640,-

Rencana Kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud, tersaji dalam Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 - 2025**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju	
		Target 2024	Pagu	Target 2025	Pagu
(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	79 skor	3,842,519,640	79 skor	4,476,771,604
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	40,000,000	4 dokumen	44,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	36,000,000	2 Dokumen	39,600,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	4,400,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	16 laporan	3,241,435,340	16 laporan	3,565,578,874
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 laporan	3,237,435,340	12 laporan	3,561,178,874
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	4 laporan	4,000,000	4 laporan	4,400,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	237,484,300	12 Bulan	261,232,730
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	22,000,000	1 paket	24,200,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	57,984,300	1 paket	63,782,730

Rencana Kerja Tahun 2024

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	1 paket	8,000,000	1 paket	8,800,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 paket	24,000,000	1 paket	26,400,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 paket	5,000,000	1 paket	5,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	16,000,000	12 dokumen	17,600,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	104,500,000	2 laporan	114,950,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan	1 unit	-	1 unit	250,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Sediakan	1 Unit		1 Unit	250,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	188,600,000	12 Bulan	207,460,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	2 laporan	42,000,000	2 laporan	46,200,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 laporan	21,600,000	2 laporan	23,760,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	2 laporan	125,000,000	2 laporan	137,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	19 Unit	135,000,000	19 Unit	148,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	17 Unit	80,000,000	17 Unit	88,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 Unit	25,000,000	1 Unit	27,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	30,000,000	1 Unit	33,000,000
Program Penataan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Desa	100%	164,000,000	100%	239,200,000

Rencana Kerja Tahun 2024

Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	6 Kegiatan	164,000,000	7 Kegiatan	239,200,000
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	207 desa	12,000,000	207 desa	13,200,000
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya.	207 Desa	30,000,000	207 Desa	33,000,000
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya.	207 desa	16,000,000	207 desa	40,000,000
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan dan Kode Desa.	207 desa	10,000,000	207 desa	30,000,000
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota.	2 Laporan	16,000,000	2 Laporan	35,000,000
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan Prasaran Desa	10 unit	80,000,000	10 unit	88,000,000
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama desa	100%	50,000,000	100%	104,000,000
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah Dokumen fasilitasi kerjasama Desa	6 Dokumen	50,000,000	6 Kegiatan	104,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	60,000,000
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	70%	3,453,200,000	80%	4,603,220,000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Administrasi yang baik	144 desa	3,453,200,000	165 desa	4,603,220,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 dokumen	44,000,000	3 dokumen	48,400,000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	72,000,000	2 Dokumen	79,200,000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	66,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	180,000,000	5 Dokumen	198,000,000

Rencana Kerja Tahun 2024

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	207 Orang	2,603,200,000	414Orang	2,863,520,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	10,000,000	2 laporan	11,000,000
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	13,200,000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	85,000,000	2 Dokumen	93,500,000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 laporan	80,000,000	2 laporan	650,000,000
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 laporan	20,000,000	3 laporan	22,000,000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	207 Dokumen	20,000,000	207 Dokumen	22,000,000
Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	3 dokumen	24,000,000	3 dokumen	26,400,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	207 orang	48,000,000	207 orang	75,000,000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasn Batas Desa	10 Desa	80,000,000	15 Desa	150,000,000
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	40,000,000
Pelaksanaan Penugasan urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	40,000,000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	175,000,000
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat desa, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat yang aktif	50%	810,000,000	60%	1,058,000,000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tingkat daerah yang aktif	881 lembaga	810,000,000	1057 lembaga	1,058,000,000
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	2 dokumen	12,000,000	2 dokumen	45,000,000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 dokumen	24,000,000	2 dokumen	26,400,000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	28,000,000	36 Lembaga	30,800,000
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	6 unit	28,000,000	6 unit	75,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	50,000,000	3 dokumen	55,000,000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	48,000,000	3 laporan	52,800,000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.	3 laporan	80,000,000	3 laporan	88,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	60,000,000

Rencana Kerja Tahun 2024

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	500,000,00 0	12 Dokumen	550,000,00 0
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.	10 Keluarga	12,000,000	10 Keluarga	35,000,000
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	10 Keluarga	12,000,000	10 Keluarga	40,000,000
			8,319,719, 640		10,481,191 ,604

Magetan, 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2023 terdapat program/kegiatan sebanyak 5 program dan 10 kegiatan serta 56 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024.

Magetan, 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGETAN



EKO MURYANTO, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001